

TAJUK RENCANA

Kisruh Parpol Jelang Pemilu

KISRUH internal partai politik (Parpol) sudah biasa terjadi di Indonesia. Pada medio Maret 2021 tahun lalu, misalnya, kisruh dialami Partai Demokrat dengan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) di Medan dan menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum. Namun Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang, sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan kepemimpinan tetap di bawah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Kini, kisruh terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) partai tersebut di Serang Banten, Minggu (4/9) memutuskan memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum dan digantikan Muhammad Mardiono sebagai plf. Isu yang beredar, penggantian tersebut salah satunya dipicu oleh pernyataan Suharso terkait amplop kiai yang menimbulkan banyak komentar.

Di satu sisi memang agak aneh, musyawarah kerja biasanya membahas program kerja, baik evaluasi yang sudah dilakukan maupun yang akan datang. Sedang penggantian ketua umum biasanya dilakukan di forum semacam muktamar, kongres atas munas, tanpa ada embel-embel "kerja".

Namun menurut Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, penggantian ketua umum dalam Mukernas yang konon dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia tersebut sudah sesuai anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Bahkan pihaknya sudah bertemu dengan Suharso Monoarfa. Meski begitu, ternyata sehari kemudian Suharso Monoarfa mengeluarkan pernyataan menolak hasil Mukernas PPP yang melengserkan dirinya dari ketua umum (ketum) dan digantikan Muhammad Mardiono. "Begini-begitu, saya masih ketua umum. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan," ucap Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional itu. Suasana pun menjadi panas. Apakah akan terjadi perpecahan karena adanya dualisme kepemimpinan, kita tidak tahu. Namun yang jelas, pada Selasa (6/9) lalu, sejumlah pengurus PPP sudah menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Mukernas dengan perubahan Ketua Umum ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Berkas itu diserahkan langsung oleh Muhammad Mardiono didampingi sejumlah elite pimpinan partai.

Kita belum tahu bagaimana ending dari konflik ini. Presiden Jokowi sendiri menyarankan agar diselesaikan secara internal. Untuk itu, sebaiknya kedua belah bertemu (terutama Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono) untuk bermusyawarah mencari jalan keluar yang terbaik. Di sisi lain, Ditjen AHU Kemenkumham mestinya juga segera melakukan verifikasi terhadap berkas yang diajukan kemudian menyampaikan keputusannya apakah menerima atau menolak. Kedua belah pihak mestinya mematuhi keputusan Ditjen AHU dan kalau tidak puas mesti menempuh jalur secara hukum, misalnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), setiap pengurus partai di semua tingkatan mestinya berkonsentrasi penuh untuk menghadapi pesta demokrasi. Setiap partai pasti ingin menjadi pemenangnya. Karena itu kalau masih disibukkan dengan urusan internal (konflik, misalnya), maka tidak akan bisa konsentrasi secara maksimal.

Karena itu, kita berharap, konflik yang terjadi di internal suatu partai hendaknya bisa segera diselesaikan. Selain itu juga berharap tidak ada partai lain yang kisruh, ataupun 'dikisruh' supaya tidak menjadi pemenang Pemilu. Sehingga semua partai *fight* bertaga di even penting ini. □

Implementasikan DBON untuk Mencetak Juara

OLAHRAGA kini bukan hanya dipandang sekedar aktivitas gerak badan semata. Lebih dari itu, olahraga semakin menunjukkan peranan konstan dalam proses pembangunan bangsa. Olahraga mampu menempatkan sebuah negara dalam hierarki prestasi internasional. Artinya, melalui olahraga dapat mengangkat harkat martabat maupun daya saing sebuah bangsa di mata dunia.

Di Indonesia, setiap tanggal 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional (Haornas). Hal ini menunjukkan wujud nyata perhatian serta kepedulian pemerintah akan pentingnya olahraga. Tahun ini, acara puncak acara puncak peringatan Haornas diselenggarakan di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Tema yang digaungkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemopora) adalah 'Bersama Cetak Juara'. Tema yang diusung sejalan ini dengan semangat Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dimana ujung dari sebuah pembinaan adalah mencetak juara di pentas dunia. Sebagaimana ditegaskan Menpora RI Zainudin Amali, bahwa peringatan Haornas ke-39 tahun ini sebagai momentum untuk kelanjutan semangat mendorong cita-cita besar prestasi bangsa dalam DBON (kemenpora.go.id).

Peta Arah

DBON sendiri merupakan sebuah peta arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang diharapkan menjadi pabrik prestasi olahraga nasional yang mengatur pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan. Lahirnya DBON diikuti dengan perubahan terhadap paradigma baru olahraga nasional. Yang mana, telah ditetapkan sasaran utama prestasi olahraga nasional adalah ajang tertinggi yaitu Olimpiade.

Namun, guna mewujudkan hal itu tentu saja dibutuhkan Kerjasama, kolaborasi, serta sinergi antara berbagai pihak terkait. Sebagaimana termaktub dalam

Agung Widodo

melalui Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2021, disebutkan bahwa pada DBON terdapat 17 kementerian/lembaga, 34 provinsi, serta 517 kota kabupaten harus bersinergi dalam melakukan pembinaan dalam upaya mencetak olahraga tangguh sehingga mampu bersaing di level internasional. Merekalah yang akan menjadi patriot-patriot olahraga



Indonesia yang kelak mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

Implementasi di Daerah

Salah satu implementasi semangat DBON yang mengusung prinsip pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan dapat kita lihat baru saja di DIY. Provinsi ini sukses menggelar dua ajang olahraga multievent daerah bertajuk Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVI dan Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) III DIY tahun 2022.

Ajang berlangsung di Kabupaten Sleman selaku tuan rumah dilaksanakan 1 - 9 September 2022. Ditutup 9 September 2022 bertepatan dengan peringatan Haornas. Terdapat 44 cabang olahraga yang dilombakan/ditandingkan pada

ajang Porda XVI DIY. Adapun total atlet yang berpartisipasi sebanyak 3.649 orang. Sementara itu, pada ajang Peparda III DIY tahun ini melombakan 10 cabang olahraga dengan total sebanyak 335 orang atlet yang bertanding.

Semangat Kebersamaan

Dengan mengusung tema *Nyawi Ji Yasa Prestasi*, menunjukkan semangat kebersamaan untuk membangun prestasi olahraga di DIY. Hal yang selaras dengan semangat DBON yang mana dalam penerapannya mesti melibatkan seluruh *stakeholder* olahraga yang ada. Sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan National Paralympic Committee (NPC) DIY selaku penyelenggara layak diapresiasi.

Kesuksesan penyelenggaraan Porda dan Peparda ini membuat dampak dan memberikan manfaat terhadap kemajuan prestasi olahraga di DIY. Ajang ini dapat menjadi wadah bagi atlet-atlet DIY untuk mengukir dan mengukir prestasi. Dengan demikian diharapkan dapat semakin memacu atlet untuk meningkatkan performa sehingga mencapai level yang lebih tinggi. Ajang kompetitif pada level daerah seperti ini sangat penting karena dapat menjadi hulu pembinaan prestasi olahraga bagi atlet-atlet DIY. □

*) **Agung Widodo MOr**, Mahasiswa S3 Ilmu Keolahragaan FIK UNY, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Penataran KONI Klaten

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Sudah Adakah Budaya Olahraga?

SEJARAH lahirnya Hari Olahraga Nasional (Haornas), mungkin banyak yang belum tahu, bila bermula dari dilakukannya Indonesia berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Panas XIV di London (1948). Waktu itu Indonesia belum resmi diakui sebagai anggota *International Olympic Committee* (IOC) dan Kemedekaan Indonesia belum diakui diseluruh dunia. Aksi unjuk kemampuan dan politik pun akhirnya ditunjukkan dengan pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) pertama, 9 September 1948 di kota Solo.

Semasa orde baru (orba), Haornas menjadi peringatan nasional yang dicanangkan 9 September 1983. Didahului dengan gerakan nasional dengan jargon yang sangat populer yaitu *emasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat*. Jargon itu pun menjadi viral, menjadi rujukan dan pameo jargon-jargon lain. Melalui payung hukum Kepres nomor 17 tahun 1984 orba memberikan ruang gerak yang luas kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga.

Optimis

Kini, setelah 39 tahun sejak seremonial pertama Haornas apakah benar masyarakat telah membudayakan olahraga dan olahraga dibudayakan sebagai aktivitas sehari hari masyarakat? Pandangan optimis tentunya dapat dibaca melalui ketersediaan fasilitas-fasilitas berbagai cabang olahraga (cabor), mulai dari sasana gym fitness, arena futsal hingga toko olahraga yang tersebar di mana-mana serta berbagai event penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Namun apakah kemudian hal tersebut menjadi satu-satunya tolok ukur bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki budaya olahraga?

Fakta data Badan Pusat Statistik dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kurang dari 30% penduduk Indonesia yang rutin berpartisipasi

Edwi Arief Sosiawan

dalam aktivitas olahraga. Atau dengan kata lain setiap 100 orang hanya kurang lebih 27 di antaranya yang aktif beraktivitas melakukan olahraga sementara sisanya pasif atau tidak rutin beraktivitas olahraga.

Hipotesis yang bisa diajukan untuk menjelaskan fenomena masih sedikitnya masyarakat Indonesia yang belum membudayakan olahraga dalam kehidupan keseharian mereka adalah ; (a). Kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Sehingga mengarahkan berbagai lapisan masyarakat untuk bekerja memenuhi hidup sebagai aktivitas pokok dan melupakan olahraga sebagai penyeimbangannya. (b). Asumsi, mitos dan persepsi dominan yang keliru dari masyarakat yang menganggap aktivitas sehari-hari seperti bekerja atau bentuk *move* lain dianggap sebagai aktivitas yang sama dengan olahraga. Padahal secara medis sangat berbeda sekali. (c) Kondisi masyarakat saat ini berada pada tahapan masyarakat *syzofernic* hidup dalam kukungan kehidupan simulacra. Sehingga cukup puas dengan menjadi penganggum/pemikmat tayangan atau totonan kapitalisme olahraga populer.

Ditawarkan

Lalu bagaimana seharusnya agar masyarakat memiliki budaya olahraga? Solusi yang bisa ditawarkan, adalah : (a). Jalur pertama adalah melalui edukasi, keberadaan pelajaran olahraga di lembaga pendidikan yang sudah ada diubah *frame* tujuannya. Bila selama ini hanya sebagai salah satu kelengkapan kurikulum saatnya kini diubah menjadi bagian dari

elemen penting dalam kurikulum. Dengan penambahan aktivitas tawaran berbagai cabang olahraga wajib untuk kegiatan ekstra kurikuler. (b). Menyosialisasikan dan merevitalisasi olahraga tradisional yang lebih bersifat rekreasi dan dekat dengan masyarakat setempat melalui instansi lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk dilaksanakan secara rutin dalam setiap minggunya.

Kemudian (c). Setiap pemerintah daerah hendaknya memiliki kebijakan dalam penataan ruang terbuka untuk aktivitas olahraga serta penyediaan fasilitas olahraga dalam ruang terbuka tersebut (d). Pemerintah baik di pusat dan daerah sudah saatnya menaikkan anggaran untuk pos olahraga. Selain dibutuhkan dalam pembinaan prestasi dan penyediaan ruang dan fasilitas olahraga, dana tersebut juga digunakan untuk aktivitas sosialisasi dan kampanye membudayakan olahraga. □

*) **Edwi Arief Sosiawan** Associate Professor Magister Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta

Pojok KR

Demo tolak kenaikan BBM merebak. -- Pemerintah mesti dengarkan mereka. ***

Abdullah Aznas Anas jabat Menteri PAN-RB -- Mesti bisa mengulang sukses di Banyuwangi. ***

Diusulkan, pelajar-mahasiswa naik Transjogja gratis. -- 'Idhep-idhep' membantu pendidikan mereka.

Beraba

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Perlu Penjelasan Terkait Kenaikan Harga BBM

BANYAK warga yang berharap harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Namun ada upaya perubahan kebijakan pemerintah yang mengubah pola perilaku masyarakat. Sehingga subsidi BBM tidak membebani APBN terus menerus. Kenyataannya berbeda dengan harapan, pemerintah tetap menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini tentu saja memberatkan masyarakat, apalagi kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut sontak diikuti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Hanya ada hal yang menggigit benak saya. Sebelum diumumkan, pemerintah sudah mengetahui dan menyadari bahwa 70% lebih subsidi dinikmati mereka yang memiliki kendaraan pribadi dan dikategorikan mampu. Ironis bukan? Dan mereka terus saja diizinkan membeli membeli BBM

bersubsidi jenis Pertalite. Kedua, jika 70% masyarakat mampu membeli Pertalite, lalu sejutinya Pertamina diproduksi untuk siapa dan untuk apa? Ketiga, saya yakin bila pemerintah tidak memberlakukan aturan BBM bersubsidi jenis Pertalite hanya untuk kendaraan roda dua, taksi dan angkutan umum, maka subsidi BBM akan terus membengkak. Jadi bagaimana, bila akhirnya hanya akan naik dan naik lagi?

Terus terang saya perlu mendapat pencerahan untuk hal ini, Entah dari pemerintah dh Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan ataupun yang lain. Agar bisa paham dan tidak tergodanya mengikuti demo mahasiswa dan buruh, yang sudah mulai lagi. □

Warga kota Yogya, nama dan alamat ada di redaksi

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirnon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yuriga Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Dra Hj Fadmi Sustuti, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiaty, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lempersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyuwangi : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, Wakil : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP